

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Masyarakat Transmigrasi Lokal

I. Latar Belakang Program Transmigrasi Lokal

Kebijakan pembangunan transmigrasi paradigma baru model Ring-1 (penataan pemindahan penduduk dari dan di dalam wilayah Kabupaten) di kawasan pesisir pantai selatan dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mendorong akselerasi pembangunan Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kulon Progo. Program ini dipandang sangat kondusif bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan juga bagi pertumbuhan wilayah, khususnya pesisir pantai selatan. Program Transmigrasi Ring-1 ini juga dipandang sinergi dengan perkembangan jalur Selatan-Selatan yang melintas di sepanjang kawasan pesisir selatan wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Transmigrasi Ring-1 didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Transmigrasi Ring-1 merupakan transmigrasi yang dilakukan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, jadi hanya merupakan perpindahan penduduk antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Program Transmigrasi Ring-1 di Kawasan Pesisir Pantai Selatan Kulon Progo ini pada mulanya dilatarbelakangi untuk mengatasi warga yang tinggal di daerah rawan bencana, sehingga akhirnya juga dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Kulonprogo, seperti korban bencana dan fragmentasi keluarga miskin. Transmigrasi Ring-1 di Kabupaten Kulonprogo juga dilatarbelakangi untuk penataan kawasan pemukiman dan relokasi atau memindahkan warga masyarakat di daerah rawan bencana yang

terjadi di sekitar daerah pegunungan, meliputi wilayah Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Nanggulan.

Dalam perkembangannya program Transmigrasi Ring-1 mempunyai tujuan yang lebih luas, yaitu sebagai berikut :

- a. Tersedianya dan terbitnya unit-unit pemukiman transmigrasi petani dan nelayan model Ring-1.
- b. Tercapainya peningkatan eksplorasi, pengolahan dan perdagangan hasil laut.
- c. Tercapainya peningkatan budidaya pertanian dalam arti luas di lahan pasir.
- d. Tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Terwujudnya penataan ruang wilayah secara terpadu di kawasan pantai.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) petani dan nelayan model Ring-1.
- g. Terwujudnya akselerasi pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan melihat tujuan tersebut akhirnya pelaksanaan Transmigrasi Ring-1 yang semula dilatarbelakangi untuk memindahkan penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana ternyata dalam perkembangannya tidak hanya untuk penduduk yang berada di daerah rawan bencana. Dari beberapa pemilihan lokasi, ditetapkan kawasan pesisir pantai selatan Kulonprogo untuk dikembangkan sebagai pemukiman dan lahan baru bagi penduduk. Pemilihan kawasan pantai selatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kawasan tersebut cukup luas termasuk luasan perstatus tanahnya, sehingga memenuhi syarat apabila

dikembangkan pemukiman yang mampu menampung banyak penduduk secara serentak.

Dalam pemanfaatan tata ruang di wilayah Pantai Selatan Kulonprogo untuk keperluan apapun harus tetap mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo, yang telah disusun berdasarkan kajian-kajian dan disepakati sebagai acuan dalam pengembangan tata ruang di kawasan pantai selatan. Disamping itu dalam penentuan area lokasi, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memperhatikan tingginya aksesibilitas, potensi pertumbuhan wilayahnya dan kelayakan usaha.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemerintah Kabupaten menetapkan area lokasi yang akan dipakai untuk transmigrasi, yaitu lahan pesisir pantai selatan. Lokasi yang akan dipakai untuk Transmigrasi Ring-1 berdasarkan usulan dari pemerintah desa ada empat desa yaitu Desa Bugel, Desa Karangsewu, Desa Pleret dan Desa Garongan. Adapun usulan lokasi yang masuk ke Pemerintah Kabupaten yang telah terealisasi adalah Desa Bugel dan Desa Karangsewu, sedangkan untuk Desa Pleret dan Desa Garongan masih dalam perencanaan, belum terealisasi.

Setelah ditentukan bahwa lokasi untuk Transmigrasi Ring-1 adalah Desa Bugel dan Desa Karangsewu, maka Bupati Kulonprogo mengeluarkan Surat Keputusan tentang lokasi, yaitu dengan mengeluarkan SK No. 2013 Tahun 2002 tentang lokasi Area Transmigrasi Model Ring-1 Di Desa Bugel Kecamatan Panjatan, dan SK No. 289 Tahun 2003 tentang lokasi Area Transmigrasi Model Ring 1 Di Desa Karangsewu Kecamatan Galur.

Pada tujuan program Transmigrasi Ring-1 tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan penduduk di kawasan rawan bencana, yaitu untuk memindahkan atau merelokasi penduduk di kawasan rawan bencana, karena mengalami beberapa penambahan tujuan dengan tidak melupakan maksud dan tujuan utama untuk tetap mengutamakan pembangunan bagi masyarakat. Penambahan tujuan program Transmigrasi Ring-1 tidak sepenuhnya hanya untuk relokasi penduduk di daerah rawan bencana, akan tetapi lebih untuk pemanfaatan dan penataan ruang pesisir pantai sekaligus mengatasi kemiskinan dengan jalan memberi lahan dan tempat tinggal bagi mereka yang belum mempunyai.

Program Transmigrasi Ring-1 di Kabupaten Kulonprogo memberikan lahan untuk tempat tinggal dan tempat usaha bagi masyarakat transmigrasi lokal. Lahan yang diberikan kepada masyarakat transmigrasi lokal ada perbedaan mengenai luas tanah antara Desa Bugel dan Desa Karangsewu. Untuk masyarakat transmigrasi lokal di Desa Bugel luas tanah yang diberikan adalah 600 m² untuk masing-masing Kepala Keluarga, sedangkan di Desa Karangsewu masyarakat transmigrasi lokal diberikan luas seluas 200 m². Tanah untuk masyarakat transmigrasi lokal di Desa Bugel lebih sempit karena masyarakat transmigrasi lokal diarahkan sebagai nelayan, yang dalam hal ini tidak memerlukan lahan garapan yang luas, sedangkan untuk masyarakat transmigrasi lokal di Desa Karangsewu pada kenyataannya lebih luas dikarenakan masyarakat di Desa Karangsewu diarahkan untuk bercocok tanam menjadi petani dengan lahan berpasir.

II. Keadaan Geografis

Desa Karangsewu merupakan salah satu desa di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Galur secara administratif memiliki 7 desa dan salah satunya adalah Desa Karangsewu yang menjadi lokasi Program Resettlement dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY. Penempatan masyarakat di lokasi transmigrasi di mulai sejak sembilan tahun yang lalu tepatnya tanggal 12 Desember 2005.

Desa Karangsewu mempunyai topografi atau bentang lahan dataran seluas 926,2370 Ha; dengan kondisi geografis, yaitu tinggi tempat dari permukaan laut 6 m, keadaan suhu rata-rata 30°C. Dari luas tersebut 243,6885 Ha merupakan daerah pemukiman umum, perkantoran 0,3000 Ha, tempat Peribadatan (masjid, gereja, pura, vihara,dll) seluas 0,9950 Ha, Kuburan/makam seluas 2,1950, dan penggunaan jalan seluas 4,0000 Ha.

Selain penggunaan lahan tersebut diatas, lahan di desa Karangsewu merupakan hamparan sawah, tegalan, perkebunan dan hutan. Luas lahan sawah di desa Karangsewu 247,9495 Ha yang terdiri atas ; sawah pengairan setengah teknis seluas 239,7895 Ha, sawah tadah hujan seluas 18,0000 Ha, dan sawah pasang surut 6,3600. Untuk perkebunan dan hutan di desa Karangsewu merupakan perkebunan dan hutan rakyat. Luas lahan perkebunan 178,7216 Ha dan hutan mencapai 45,0000 Ha.

Desa Karangsewu yang pada sisi selatan merupakan daerah pantai, dan sebagian daerah pantai tersebut merupakan daerah kritis/tandus. Luas lahan kritis/tandus di Desa Karangsewu mencapai 120 Ha. Lahan kritis tersebut terus

diupayakan oleh Pemerintah Desa untuk dimaksimalkan menjadi lahan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Karangsewu. Batas wilayah dan jarak pusat pemerintahan Desa Karangsewu dapat dilihat di tabel 2.

Tabel 2. Batas Wilayah dan jarak pusat Pemerintahan Desa Karangsewu

Keterangan	Desa Karangsewu
a. Batas Wilayah	
Utara	Desa Tirtorahayu
Selatan	Samudera Indonesia
Timur	Desa Bugel
Barat	Desa Nomporejo
b. Jarak Pusat (km)	
Jarak Ibukota Kecamatan	2,50
Jarak Ibukota Kabupaten	16
Jarak Ibukota Provinsi	29

Buku Administrasi Desa Karangsewu

Berdasarkan tabel 2. Diketahui bahwa Desa karangsewu mempunyai batas dengan Desa Tirtorahayu, batas wilayah seatan langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia karena wilayah Desa Karangsewu pada sisi selataan adalah daerah pantai. Batas wilayah Timur berbatasan dengan Desa Bugel yang merupakan salah satu Desa dalam progam kawasan Transmigrasi Ring-1 dan untuk batas wilayah barat berbatasan dengan Desa Nomporejo.

Desa Karangsewu mempunyai jarak dengan Ibukota Kecamatan yaitu yaitu Kecamatan Galur yang berjarak tidak jauh hanya mencapai 2,50 km. Jarak tempuh Desa karangsewu menuju ke Ibukota kabupaten yaitu Kabupaten

Kulonprogo mencapai 16 km dan jarak yang jauh ditempuh untuk menuju Ibukota Provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai jarak 29 km.

III. Keadaan Penduduk

Untuk mengetahui keadaan penduduk Desa Karangsewu dan persebarannya dapat dilihat dari jumlah penduduk, golongan umur serta rasio jenis kelamin.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Karangsewu

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Laki-laki	3.966
2.	Jumlah Perempuan	4.267
3.	Jumlah KK	2.094
4.	Jumlah Kepadatan Penduduk	889 per Km

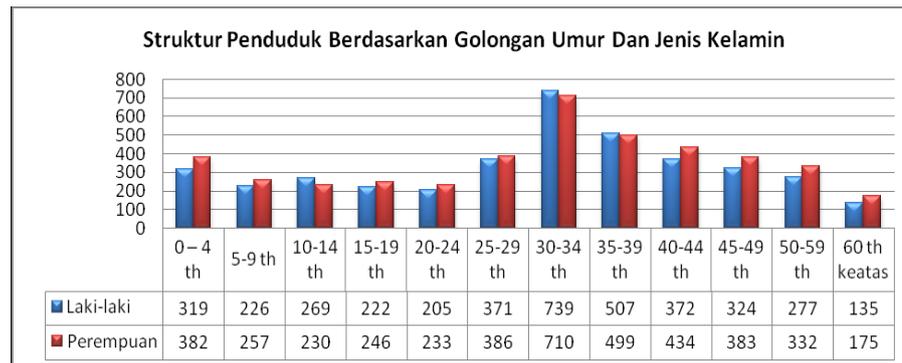
Buku Administrasi Desa Karangsewu

Dari jumlah penduduk tersebut, beberapa warga merupakan transmigran lokal dari Kecamatan Samigaluh yang merupakan daerah rawan akan bencana longsor. Hal ini menyebabkan adanya proses adaptasi wilayah pada masyarakat transmigran lokal yang awalnya mereka tinggal di daerah pegunungan kemudian pindah di kawasan pesisir pantai.

Disamping itu, pertumbuhan penduduk juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berakibat sulitnya suatu keluarga untuk meningkatkan kesejahteraannya, karena pendapatan yang dihasilkan akan semakin banyak yang dikeluarkan. Untuk itu yang diperlukan adalah penduduk usia produktif (15-49 tahun) yang bekerja atau mempunyai

penghasilan. Adapun untuk desa Karangsewu, golongan umur penduduk dapat dilihat dalam tabel diagram di bawah ini :

Tabel 4. Struktur Penduduk Berdasarkan Golongan Usia Dan Jenis Kelamin Desa Karangsewu Tahun 2014

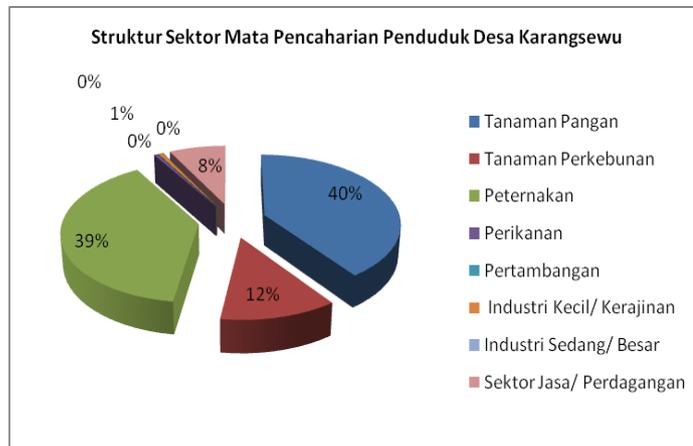


Analisis Data Sekunder

Tabel 4. menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Karangsewu yang masuk ke dalam golongan usia produktif (15-49 tahun) berjumlah 5. 631 orang yang terdiri dari 2.740 orang laki-laki dan 2.891 orang perempuan.

Informasi yang masih berhubungan dengan kependudukan dan tidak kalah penting adalah bidang usaha yang digeluti oleh penduduk desa Karangsewu. Keterangan ini penting untuk mengetahui di sektor mana sajakah penduduk bekerja dan apakah sesuai dengan karakter wilayah desa Karangsewu. Tabel di bawah ini dapat memberikan informasi tersebut.

Tabel 5. Struktur Sektor Pekerjaan Penduduk Desa Karangsewu Tahun 2014

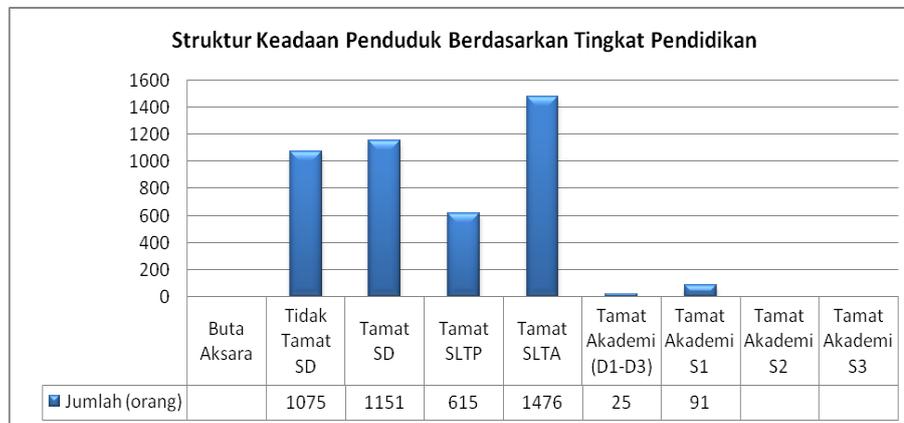


Analisis Data Sekunder

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penduduk desa Karangsewu kebanyakan bekerja pada sektor tanaman pangan yaitu 3.298 orang atau 40 % dari usia produktif sebesar 5.631 orang, dan sektor peternakan menempati posisi kedua yaitu 3.222 orang atau 39 % dengan selisih angka 1 % dengan sektor tanaman pangan. Sektor tanaman perkebunan di posisi ketiga terbesar yaitu sejumlah 12 % atau 1.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan peternakan menjadi andalan perekonomian penduduk desa Karangsewu.

Di kawasan transmigrasi lokal Desa Karangsewu dalam hal pembangunan sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu refleksi tingkat kesejahteraan dan kemajuan kehidupan suatu daerah. Kondisi masyarakat yang memiliki tingkat yang memadai akan mempermudah dalam percepatan pembangunan karena perpindahan informasi dan pemahaman pada bidang teknologi akan mudah diterima. Untuk mengetahui gambaran jumlah penduduk desa Karangsewu berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Struktur Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Karangsewu tahun 2014



Analisis Data Sekunder

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa di desa Karangsewu tingkat pendidikan memang masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat desa karangsewu yang tidak tamat SD dan mayoritas tamat pendidikan sekolah hanya sampai pada tingkatan SLTA, walaupun ada yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tapi tidak begitu banyak.

Keterbatasan ekonomi membuat banyak keluarga di Desa Karangsewu yang tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Serta adanya keharusan bagi anak untuk membantu kerja orang tua di sawah/kebun yang lebih jelas menghasilkan uang membuat pendidikan adalah barang yang mahal. Bagi mereka “bisa baca tulis” cukup untuk menjalani kehidupan ini. Hal ini sesuai dengan data analisis penulis pada tabel 4. yang menunjukkan kesesuaian dengan sektor bidang usaha yang kebanyakan digeluti oleh masyarakat desa Karangsewu, yaitu sektor pertanian dan peternakan yang

tidak membutuhkan pengetahuan/pendidikan yang tinggi cukup pengalaman dan kerja keras.

IV. Keadaan Pertanian

Siklus waktu kegiatan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian pada bulan Mei-Oktober hasil yang bagus untuk jenis pertanian cabai merah. Pada bulan Januari-Februari adalah semangka. Dua jenis komoditas tersebut merupakan jenis pertanian dengan nilai ekonomi tinggi, sehingga warga Ring-1 mengandalkan kegiatan pertanian untuk dua jenis komoditas tersebut. Untuk sayuran masyarakat menanam pada bulan November-Maret yang merupakan musim penghujan, sehingga sangat cocok untuk komoditas sayuran.

Jenis sayuran yang banyak dikembangkan adalah kacang panjang, sawi hijau, tomat dan lain-lain. Sekarang baru dilakukan ujicoba oleh sejumlah warga yaitu jenis komoditas bawang merah. Hasil dari ujicoba terhadap komoditas ini cukup bagus, sehingga kedepan komoditas ini akan sangat potensial dikembangkan selain komoditas-komoditas yang telah dikembangkan saat ini.

Kegiatan perikanan tangkap, pada bulan Maret-Juni merupakan siklus dengan nilai sedang untuk hasil tangkapan ikan. Pada bulan-bulan tersebut jenis ikan banyak dihasilkan adalah ikan tengiri dan talangan. Pada bulan Agustus-Desember, merupakan bulan yang paling bagus untuk kegiatan penangkapan ikan. Hasil tangkapan yang banyak didapat adalah ikan dengan nilai ekonomis tinggi seperti bawal putih, bawal hitam dan tengiri. Hasil perikanan ini memberi kontribusi penting pada kegiatan ekonomi masyarakat Ring-1 Karangsewu selain kegiatan pertanian.

Upaya untuk mendukung peningkatan dalam bidang perekonomian dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, baik yang diusahakan pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Sampai dengan sekarang di wilayah Ring-1 Karangsewu telah ada satu Pos Kesehatan dan Posyandu yang buka setiap hari Rabu jam 08.00-11.00 WIB, tetapi kondisi gedungnya kurang terawat sehingga banyak yang rusak. Selain Pos Kesehatan, juga telah berdiri sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), masjid dan tempat pertemuan warga/ balai kampung.

Dalam menunjang aktivitas dalam bidang perekonomian masyarakat transmigrasi lokal di Desa Karangsewu dibutuhkan sarana penunjang salah satunya adalah prasarana jalan raya dan jembatan. Keadaan jalan masuk ke lokasi relatif baik dengan aspal di semua ruas jalan memanjang sampai jalan tembus lintasan Dendles melalui Pantai Trisik desa Banaran. Jalan gang kampung juga telah di cor-block pada dua sisi ruas jalan, sehingga membantu sekali bagi kendaraan bermotor karena jenis tanah di Ring-1 yang merupakan kawasan pasir pantai dengan adanya cor-block tersebut sangat membantu jalur lalulintas warga.

Dari segi perekonomian warga, dengan adanya kondisi jalan yang baik di Kawasan Transmigrasi Ring-1 Desa Karangsewu setidaknya akan mempermudah akses masyarakat transmigrasi lokal menuju tempat-tempat yang diinginkan. Salah satunya akan mempermudah akses pemasaran produk dalam menunjang dibidang perekonomian masyarakat, seperti menuju pasar, menuju kota untuk memasarkan hasil suatu produk dari usaha yang dimiliki masyarakat transmigrasi lokal.

B. Profil LKM BMT Trans Ngudi Makmur

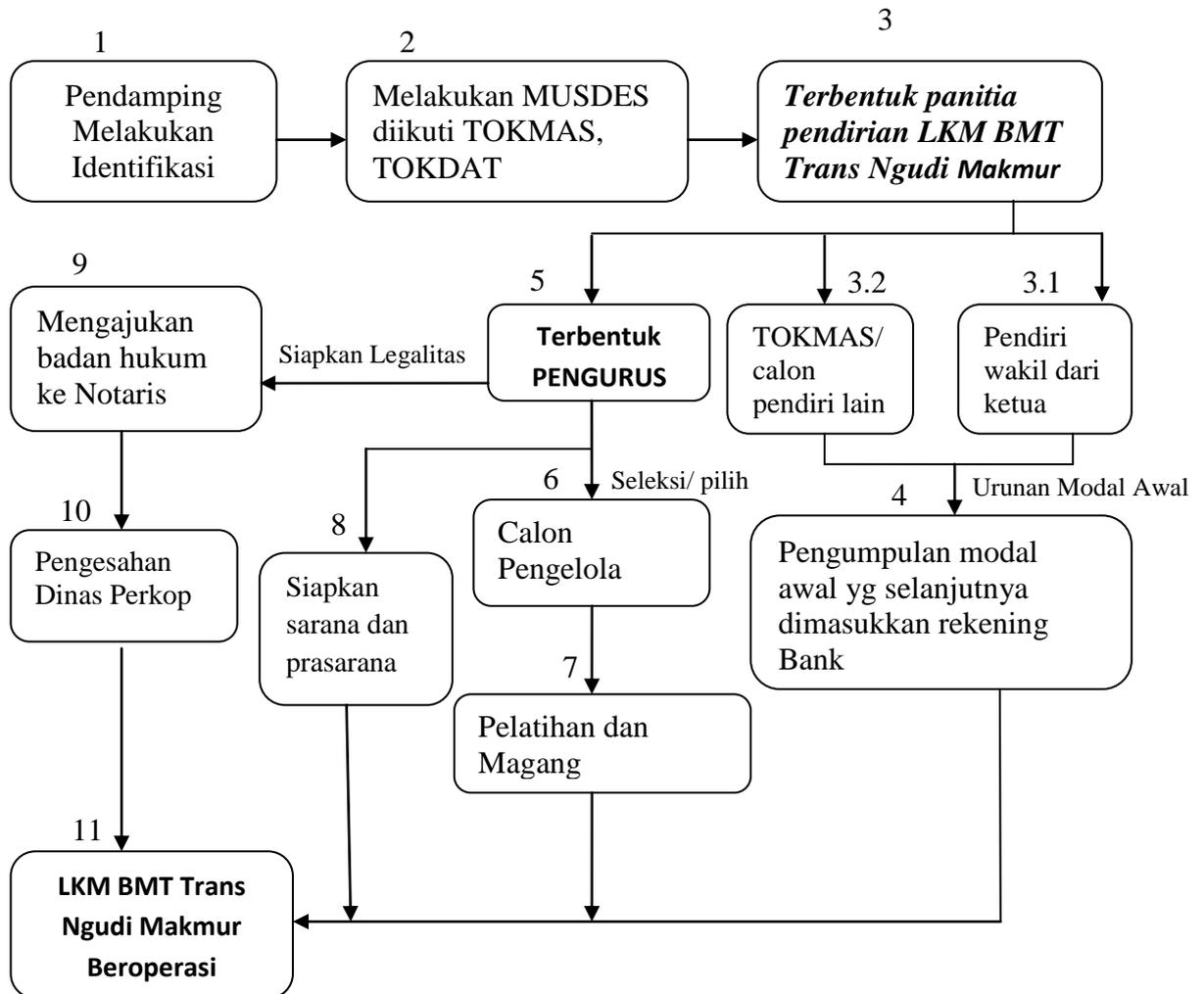
Lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Di wilayah kawasan transmigrasi lokal Ring-1 Desa Karangsewu terdapat satu lembaga keuangan mikro yang tidak hanya berperan dalam jasa keuangan untuk usaha mikro atau petani tetapi melakukan pemberdayaan ekonomi khusus kepada masyarakat transmigrasi lokal Ring-1 Desa Karangsewu. Untuk mengetahui gambaran tentang lembaga keuangan mikro tersebut maka perlu diketahui proses pendirian, visi dan misi, tujuan dan struktur organisasi.

1. Proses Pendirian LKM BMT Trans Ngudi Makmur

Proses pendirian kelembagaan ekonomi atau yang sering dikenal dengan koperasi di pemukiman transmigrasi selama ini, kebanyakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *top-down*, sehingga banyak koperasi yang terlantar setelah ditinggal petugas pembina. Agar kelembagaan ekonomi (koperasi) dapat berjalan dengan baik, maka mulai dari proses pendiriannya harus melibatkan masyarakat transmigrasi. Hal inilah yang melatarbelakangi terbentuknya LKM BMT Trans Ngudi Makmur yang dalam tahapan proses pendirian dilakukan dengan *bottom-up* karena semua atas peran masyarakat dengan adanya pendampingan dari Instansi Dinas untuk legalitasnya.

Peran Instansi Dinas menunjukkan bahwa dalam tahapan pendirian LKM BMT Trans Ngudi Makmur di kawasan transmigrasi lokal konsep *bottom-up* yang diterapkan tidak murni. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya

tetap membutuhkan peran pihak luar untuk mengarahkan masyarakat transmigrasi lokal tersebut di mulai dari pendiriannya, pengurusnya, pengelolanya, penggalangan modal awal dan pengawasannya. Berikut adalah proses tahapan pendirian pasrtisipatif sebagai berikut :



Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

GAMBAR. 6. Skema tahapan pendirian LKM BMT Trans Ngudi Makmur

Pengelola yang tidak lain adalah masyarakat transmigrasi lokal dalam menjalankan manajemen operasional LKM BMT Trans Ngudi Makmur perlu didampingi oleh pendamping dari Instansi Dinas Sosnakertrans Kulon Progo

bekerjasama dengan Dinas Nakertrans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga mampu mengoperasionalkannya sendiri. Selain itu pendamping mengajak pengelola LKM BMT Trans Ngudi Makmur untuk membuat kesepakatan jadwal pembinaan dengan warga binaan dengan pola pertemuan Rembug Himpunan (RUMPUN). RUMPUN merupakan pertemuan seminggu sekali yang diikuti minimal dua kelompok (10-20 orang) yang terdiri dari Kelompok Usaha Bersama Trans Madani dengan kegiatan usaha pada sektor pertanian dan peternakan. Pertemuan dilakukan selama 90 menit dengan kegiatan :

- a. Ikrar anggota kelompok
- b. Pembacaan daftar hadir oleh pendamping
- c. Paparan usaha anggota
- d. Informasi usaha
- e. Kegiatan simpan dan pinjam
- f. Kegiatan pengembalian pinjaman dan bagi hasil
- g. Bagi-bagi pengalaman (Balan)

Pada tanggal 17 September 2008 LKM BMT Trans Ngudi makmur telah beroperasi dengan dana swadaya masyarakat Rp. 8.000.000,- dan barulah selang satu tahun kemudian kelembagaan LKM BMT Trans Ngudi Makmur telah resmi dengan lembaga hukum sebagai legalitasnya yaitu BH. No. 34/XV.3/2009, sehingga dengan adanya legalitas tersebut LKM BMT Trans Ngudi Makmur dapat beroperasi lebih luas dan memiliki kekuatan hukum untuk memperoleh pengakuan yang sah sebagai institusi keuangan.

2. Visi dan Misi LKM BMT Trans Ngudi Makmur

a. VISI

Mewujudkan LKM yang berkembang dengan aset minimal 3 Miliar dan memiliki gedung sendiri. Mampu membawa masyarakat transmigrasi lokal pada tingkat kesejahteraan dengan memiliki pendapatan minimal Rp. 30.000,- per hari serta menjadi orang tua asuh bagi anak yatim di wilayah kawasan transmigrasi lokal Ring-1 Desa Karangsewu. LKM BMT Trans Ngudi Makmur dalam kinerjanya mempunyai visi yaitu “Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Terbaik dan Memberdayakan”. Terbaik yang berarti mampu menjaga keberlangsungan hidup lembaga secara mandiri sehingga ukuran-ukuran lembaga mikro perlu dijaga dengan demikian akses permodalan kepada para pengusaha akan tetap bisa dilaksanakan. Memberdayakan berarti mempertahankan skala usaha mitra dan mengembangkan usaha mitra.

b. MISI

- 1) Peningkatan saham dan memperluas keanggotaan dengan peningkatan jumlah anggota.
- 2) Peningkatan kualitas layanan dan jaringan pemasaran
- 3) Peningkatan pendapatan petani anggota LKM BMT Trans Ngudi Makmur
- 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan LKM BMT Trans Ngudi Makmur

3. Tujuan LKM BMT Trans Ngudi Makmur

Disamping visi dan misi yang diembannya, LKM BMT Trans Ngudi Makmur Trans Ngudi Makmur memiliki tujuan usaha yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

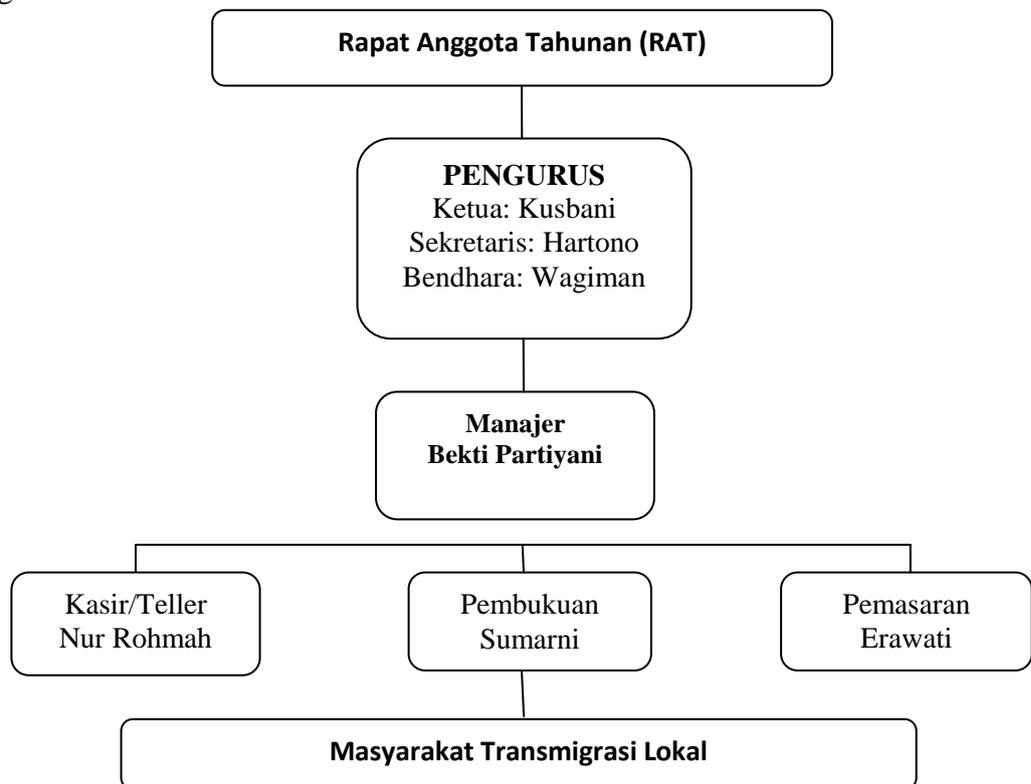
- a. Mensejahterakan dan memakmurkan anggota
- b. Membantu progam Pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup petani
- c. Berperan serta dalam mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, fakir miskin dan anak yatim
- d. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha kecil
- e. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil yang membutuhkan dana
- f. Membebaskan umat atau pelaku usaha dari cengkraman bunga atau *rente*
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha, sehingga dapatmenambah kesempatan kerja dan pendapatan
- h. Menghimpun dana umat yang selama ini tidak mau menyimpan uangnya di bank – bank atau lembaga keuangan yang masih menggunakan sistem bunga

4. Struktur Organisasi dan Tugas serta Fungsi

Dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah struktur organisasi sebagai pedoman siapa saja yang berhak memberikan instruksi/komando serta siapa saja yang berada dibawah garis struktural untuk mempermudah dalam menjalankan

sebuah organisasi. Organisasi LKM BMT Trans Ngudi Makmur disusun dalam suatu struktur yang mencerminkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab secara kolektif. Masing-masing bagian (sub struktur) menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan nomenklatur jabatan yang diamanahkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKM BMT Trans Ngudi Makmur (AD/ART LKM BMT Trans Ngudi Makmur).

Dalam tahap awal berdiri, organisasi LKM BMT Trans Ngudi Makmur dibentuk dengan struktur yang sederhana, ramping dan kaya sesuai dengan kemampuan SDM yang ada. Berikut ini adalah struktur organisasi LKM BMT Trans Ngudi Makmur :



Arsip LKM BMT Trans Ngudi Makmur

Gambar. 7 Struktur Organisasi LKM BMT Trans Ngudi Makmur

Bagan struktur organisasi LKM BMT Trans Ngudi Makmur tersebut dapat dijelaskan bahawa tugas dan fungsi dari masing-masing bagian sebagai berikut :

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) LKM BMT Trans Ngudi Makmur

Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota LKM BMT Trans Ngudi Makmur yang diorganisasikan oleh pengurus LKM BMT Trans Ngudi Makmur, untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha LKM BMT, dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang berwenang untuk :

- 1) Menetapkan anggaran dasar
- 2) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus LKM BMT Trans Ngudi Makmur
- 3) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban keuangan LKM BMT Trans Ngudi Makmur dari pengurus
- 4) Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan LKM BMT Trans sesuai dengan AD/ART
- 5) Pengembangan Sisa Hasil Usaha (SHU)

b. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota LKM BMT yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi. Kepengurusan

LKM BMT Trans Ngudi Makmur terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara. Fungsi dan tugas masing-masing jabatan sebagai berikut :

1) Ketua

- a) Memimpin rapat anggota pengurus dan rapat pengurus
- b) Memimpin anggota pengurus
- c) Melakukan pembinaan kepada anggota
- d) Menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan LKM BMT Trans Ngudi Makmur
- e) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota LKM BMT Trans Ngudi Makmur sebagaimana tertuang dalam AD/ART LKM BMT Trans Ngudi Makmur, khususnya mengenai pencapaian tujuan

2) Sekretaris

- a) Membuat dan memelihara berita acara yang asli dari hasil rapat anggota dan rapat-rapat pengurus
- b) Bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai ketentuan AD/ART
- c) Memberikan catatan-cataatan keuangan LKM BMT Trans Ngudi Makmur hasil laporan dari pengelola
- d) Memverifikasi dan memberikan saran pada Ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan LKM BMT Trans Ngudi Makmur

3) Bendahara

- a) Memegang buku rekening LKM BMT Trans Ngudi Makmur
- b) Bertanggungjawab mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola

c. Pengelola

Pengelola adalah pelaksana operasional harian LKM BMT Trans Ngudi Makmur. Pengelola terdiri dari : manajer, bagian pembiayaan, bagian administrasi pembukuan, teller dan bagian penggalangan dana serta pembinaan anggota. Masing-masing posisi tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Manajer, bertugas :

- a) Memimpin operasional harian LKM BMT Trans Ngudi Makmur dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
- b) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi rencana:
 - i. Pemasaran
 - ii. Pembiayaan
 - iii. Operasional kantor
 - iv. Keuangan
- c) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus
- d) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya

- e) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus, berupa laporan:
 - i. Pembiayaan baru
 - ii. Perkembangan pembiayaan
 - iii. Keuangan
 - f) Membina usaha anggota LKM BMT Trans Ngudi Makmur, baik perorangan maupun kelompok
- 2) Bagian Pembiayaan
- a) Melakukan pelayanan dan pembinaan anggota
 - b) Menyusun rencana pembiayaan
 - c) Menerima berkas pengajuan pembiayaan
 - d) Melakukan analisis pembiayaan
 - e) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembayaran
 - f) Melakukan administrasi pembiayaan
 - g) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
 - h) Membuat laporan perkembangan pembiayaan
- 3) Bagian Administrasi dan Pembukuan
- a) Menangani administrasi kantor
 - b) Menangani administrasi keuangan
 - c) Mengerjakan jurnal dan buku besar
 - d) Menyusun neraca percobaan dan jurnal penyesuaian
 - e) Melakukan perhitungan bagi hail/bunga simpanan

- f) Menyusun laporan keuangan secara periodik
- 4) Teller/kasir
- a) Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir)
 - b) Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
 - c) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
 - d) Melayani dan membayar pengambilan tabungan
 - e) Membuat buku kas harian
 - f) Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada
- 5) Bagian Penggalangan Dana
- a) Melakukan kegiatan penggalangan tabungan anggota/masyarakat
 - b) Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan
 - c) Melakukan analisis data tabungan
 - d) Melakukan pembinaan anggota penabung
 - e) Membuat laporan perkembangan tabungan
- 6) Bagian Pembinaan Anggota
- a) Memberikan pembinaan kepada anggota
 - b) Memotivasi usaha anggota
 - c) Membina Sumber Daya Manusia anggota

Proses pendirian LKM BMT Trans Ngudi Makmur faktanya memang atas inisiatif masyarakat transmigrasi lokal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi dengan modal awal yang diperoleh dari masyarakat transmigrasi lokal itu sendiri. Pada bagan struktur dan penjelasan pada tugas dan

fungsi memang ada yang double job atau dengan kata lain merangkap tugas dalam pelaksanaannya, seperti pada struktur organisasi teller/kasir merangkap tugas bagian pembiayaan dan pada struktur organisasi bagian pemasaran dijelaskan pada bagian pembinaan anggota. Bagian pemasaran yang dijelaskan dalam tugas dan fungsinya dibagian pembinaan anggota mempunyai tujuan membantu proses pemasaran suatu produk dan membina sumber daya manusia dalam kegiatan memotivasi usaha, sehingga mampu mempunyai daya saing produk dan membuka jejaring mitra usaha pemasaran semakin luas.

C. Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Di dalam sub bab ini dilakukan kajian untuk mendeskripsikan dan memahami tentang pelaksanaan implementasi strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM BMT Trans Ngudi Makmur terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi Ring 1 Desa Karangsewu berdasarkan data-data yang didapatkan selama penelitian dengan cara wawancara dan selanjutnya dilakukan kajian secara teoritis. Data pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan *internal* LKM BMT Trans Ngudi Makmur sebagai pihak yang mengetahui implementasi strategi pemberdayaan masyarakat dan *eksternal* LKM BMT Trans Ngudi Makmur sebagai pihak yang menerima langsung dampak adanya strategi pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal, yaitu masyarakat transmigrasi lokal.

Pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan LKM BMT Trans Ngudi melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam mengarahkan masyarakat transmigrasi lokal untuk dapat berpartisipasi didalam pemberdayaan masyarakat. Tokoh masyarakat

yang ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal adalah Bapak Sholicin sebagai Kepala Dusun dan pihak LKM BMT Trans Ngudi Makmur yang bertanggungjawab dalam implemementasi strategi pemberdayaan masyarakat adalah Ibu Bekti sebagai manajer. Dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat yang berperan di lapangan adalah Bapak Sholichin dengan didampingi dua pihak LKM BMT Trans Ngudi Makmur, yaitu Ibu Nur dan Ibu Marni.

Masyarakat transmigrasi lokal berangkat dari kesamaan dalam sumber daya manusia dengan latar belakang daerah yang rawan akan bencana, dan hubungan yang terjalin begitu erat yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan yang besar kepada beberapa tokoh masyarakat merupakan suatu kekuatan modal sosial yang sangat berpengaruh dalam proses implementasi startegi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LKM BMT Trans Ngudi Mamkur. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Bekti selaku Manajer LKM BMT Trans Ngudi Makmur yang bertanggungjawab dalam implementasi progam strategi pemberdayaan masyrakat transmigrasi lokal:

“Sekitar 5 tahun yang lalu setelah LKM BMT Trans Ngudi Makmur terbentuk, maka diadakannya progam pemberdayaan untuk masyarakat transmigrasi lokal. Pada hakikatnya progam pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan kepada masyarakat transmigrasi lokal di kawasan transmigrasi ring 1 Desa Karangsewu itu ada 4 (empat) kegiatan dalam implementasinya, yaitu refleksi kemiskinan, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan aset keuangan, pemberdayaan aset sosial.”

Pelaksanaan kegitan pemberdayaan masyrakat yang dilakukan merupakan serangkaian proses dan berkelanjutan yang dimulai sudah lebih dari 5 tahun lalu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi lokal melalui

keempat macam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut maka implementasi strategi pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Refleksi Kemiskinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Becti selaku Manajer LKM BMT Trans Ngudi Makmur tentang implementasi strategi yang pertama, yaitu:

“Kami melakukan penyadaran akan keadaan masyarakat transmigrasi lokal terlebih dahulu, sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan yang berupa pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kemampuan mereka. Penyadaran tentang keadaan ini kami sebut dengan refleksi kemiskinan yang dalam pelaksanaannya melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, dan dilaksanakan pada tiap tingkat basis RT sebanyak 9 kali pertemuan pada Tahun 2008 setelah terbentuknya LKM BMT Trans Ngudi Makmur. Kegiatan refleksi kemiskinan ini dilakukan dengan tujuan menyadarkan mereka masyarakat transmigrasi lokal terhadap apa yang menjadi penyebab kemiskinan secara global, kemudian diimajinasikan bahwa itu dapat terjadi kepada mereka. Sehingga diharapkan mereka akan ikut berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ketika mengetahui manfaatnya.”

Dari hasil wawancara di atas mengenai langkah awal sebelum memulai kegiatan pelatihan-pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat adalah berupa refleksi kemiskinan. Refleksi kemiskinan ketika dikaji lebih jauh lagi maka sesungguhnya kegiatan awal ini merupakan langkah awal untuk membawa masyarakat pada tahapan dimana sumber daya manusia masyarakat transmigrasi lokal itu dapat mengerti akan keadaan mereka sekarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat transmigrasi lokal yang bernama Bapak Miskijo (45 thn) mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya dampak yang dirasakan terhadap adanya implementasi strategi pemberdayaan masyarakat melalui refleksi kemiskinan adalah sebagai berikut:

“Waktu di dalam forum saya awalnya memang merasa canggung, tapi setelah mengerti pada penjelasan mengenai penyebab kemiskinan itu adalah berasal dari diri kita sendiri yang merasa malas untuk berubah menjadi manusia yang lebih maju lagi maka saya mulai terbuka pikirannya. Kegiatan itu juga dikemas dengan santai sehingga hampir semua masyarakat, termasuk saya berani mengungkapkan pendapat atau *unek-uneknya* dan saya pun mulai mengerti bahwa apa yang menjadi kebutuhan dalam mengurugani kemiskinan adalah faktor pekerjaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat transmigrasi lokal dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan ada manfaat atau dampaknya dari implementasi strategi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan refleksi kemiskinan yang dalam pelaksanaan di lapangan dikemas santai dalam *Focus Group Discussion*. Pengemasan kegiatan yang santai tersebut mampu membawa masyarakat untuk dapat mengutarakan pendapatnya, sehingga forum akan semakin hidup dengan adanya keaktifan orang dalam keberaniannya mengutarakan pendapat di forum tersebut.

Kegiatan refleksi kemiskinan juga berfungsi sebagai pembelajaran awal bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimana keputusan untuk menerima atau menolak program tidak hanya diputuskan oleh kelompok elite masyarakat namun melibatkan seluruh komponen masyarakat hingga tingkat basis RT. Dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan indikator yang disepakati untuk mengidentifikasi kemiskinan adalah berdasarkan pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa seseorang seharusnya memiliki pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder tentang sektor mata pencaharian masyarakat transmigrasi lokal di Desa Karangsewu pada tabel 5 halaman 55,

menunjukkan sebagian besar masyarakat transmigrasi lokal bermata pencaharian di bidang peternakan dan pertanian yang terdiri atas :

- a. Subsektor Pertanian Tanaman Pangan, yaitu Pemilik tanah sawah berjumlah 987 orang, pemilik tanah tegal/ladang berjumlah 302 orang, Penyewa /Penggarap berjumlah 33 orang dan buruh tani berjumlah 1982 orang.
- b. Subsektor Perkebunan/Perladangan, yaitu dengan status buruh perkebunan berjumlah 36 orang.
- c. Subsektor Peternakan, yaitu jumlah pemilik ternak sapi ada 96 orang; jumlah pemilik ternak Kambing ada 30 orang, jumlah pemilik ternak ayam ada 15 orang; jumlah pemilik ternak kerbau 25 orang; jumlah pemilik ternak itik 7 orang, jumlah pemilik ternak domba 8 orang; dan jumlah buruh peternak ada 5 orang, dengan jumlah keseluruhan ada 186 orang.
- d. Subsektor Perikanan/kenelayanan, yaitu dengan status pemilik kolam berjumlah 72 orang, pengelola kolam 156 orang, penyewa kolam 7 orang dan nelayan 35 orang
- e. Subsektor Pertambangan Galian Tambang Pasir, yaitu dengan status Buruh usaha pertambangan galian berjumlah 15 orang.
- f. Subsektor Industri Kecil/Kerajinan, yaitu pemilik usaha industri rumah tangga berjumlah 40 orang.
- g. Subsektor Industri Besar/Sedang, yaitu dengan jumlah buruh industri ada 6 orang.

- h. Subsektor Jasa/Perdagangan, meliputi Jasa Pemerintahan/Non Pemerintahan, yaitu Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai kelurahan berjumlah 27 orang, Guru berjumlah 212 orang, ABRI 26 orang, mantri kesehatan/perawat 5 orang, dan PNS lainnya 21 orang, Pensiunan ABRI 61 orang; Jasa Lembaga – lembaga Keuangan, terdiri dari Perbankan berjumlah 1 orang, perkreditan rakyat berjumlah 1 orang; Jasa Perdagangan, terdiri dari warung berjumlah 16 orang dan pertokoan 18 orang.

Aktivitas pekerjaan dalam kegiatan perekonomian di atas menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat transmigrasi lokal di Karangsewu memiliki pekerjaan yang layak sebagai penunjang kebutuhan hidup, walaupun sebagian besar masyarakat transmigrasi bermata pencaharian disektor pertanian dan peternakan. Ditinjau dari aspek tahapan menurut Sulistiyani (2004: 83-84) pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal telah melewati tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri dari kegiatan refleksi kemiskinan ini, dimana mereka mendapatkan banyak cerita dan pengalaman dari forum diskusi, serta dapat bertukar pikiran dengan para pendamping sebagai fasilitator dari pihak LKM BMT Trans Ngudi Makmur yang bekerjasama dengan instansi Dinas Nakertrans Kulon Progo dalam menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai kondisi kemiskinan dan kondisi lainnya. Melalui rangkaian FGD tersebut, masyarakat dapat mencurahkan pemikirannya secara bebas, apalagi kegiatan tersebut dikemas dalam suasana yang tidak begitu formal.

Analisis hasil terhadap kegiatan refleksi kemiskinan yang telah dilakukan terdapat proses untuk meningkatkan *human aset* dalam program yang bersifat kualitatif seperti penyuluhan yang dikonsepsi tidak formal dengan tujuan untuk mendapatkan output pada kesadaran diri individu masyarakat transmigrasi lokal terhadap keadaannya.

2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bekti selaku Manajer LKM BMT Trans Ngudi Makmur:

“Dalam langkah kedua setelah refleksi kemiskinan adalah pemberdayaan sumber daya manusia untuk diberikan kepada masyarakat transmigrasi lokal melalui beberapa pelatihan seperti pelatihan budidaya pertanian organik, pelatihan budidaya california, pelatihan budidaya ayam lokal unggulan dan pelatihan pengolahan untuk bidang pertanian dan peternakan. Tetapi sebelum dilakukan kegiatan pelatihan dalam pemberdayaan sumber daya manusia yang pertama dilakukan adalah pelatihan motivasional yang bertujuan menumbuhkembangkan semangat partisipasi aktif masyarakat transmigrasi lokal dalam kegiatan pelatihan yang akan dilakukan LKM BMT Trans Ngudi Makmur.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kegiatan pelatihan motivasional yang dilakukan sebelum memulai melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan dengan tujuannya masing-masing. Kegiatan pelatihan motivasional dalam rangka membangun paradigma kesadaran yang dalam outputnya adalah adanya partisipasi aktif masyarakat transmigrasi lokal dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur nantinya, akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat transmigrasi lokal dengan partisipasi aktif yang maksimal.

Implementasi program pemberdayaan masyarakat LKM BMT Trans Ngudi Makmur untuk tahapan selanjutnya setelah dilaksanakannya kegiatan

pelatihan motivasional adalah peningkatan SDM. Kegiatan pada komponen peningkatan SDM adalah dengan pembekalan pelatihan-pelatihan ketrampilan dibidang pertanian, peternakan, dan kuliner. Pada bidang pertanian pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan budidaya pertanian organik dan pelatihan budidaya pepaya california, selanjutnya pada bidang peternakan pelatihan yang diberikan adalah pelatihan budidaya Ayam Lokal Pedaging Unggulan (ALPU) dan yang terakhir adalah bidang kuliner dengan memberikan pelatihan produk olahan untuk kedua bidang tersebut. Dalam hal ini LKM BMT Trans Ngudi Makmur bekerjasama dengan Dinas Sosnakertrans untuk dapat memberikan pelatihan yang maksimal dengan memberikan kepada tenaga ahli di bidangnya.

Pelatihan tidak hanya bagi masyarakat transmigrasi lokal saja, tetapi pembinaan pada internal LKM BMT Trans Ngudi Makmur juga dilakukan yaitu dalam bidang administrasi, informasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas layanan yang lebih baik lagi. Pembinaan dibidang administrasi fokus pada tata cara pengelolaan dan administrasi yang baik dan benar. Selanjutnya, pembinaan bidang informasi dan teknologi untuk internal LKM BMT Trans Ngudi Makmur adalah dengan pendelegasian pelatihan untuk pengembangan data dan sistem informasi teknologi yang diadakan oleh instansi Dinas Pemerintahan.

Pada dasarnya alasan diadakannya pelatihan budidaya pertanian secara organik dan budidaya pada komoditas pepaya california adalah untuk diferensiasi produk pertanian dengan tidak melupakan kelestarian lingkungan di kawasan transmigrasi lokal. Selanjutnya, untuk komoditas bidang peternakan berorientasi

pada budidaya penggemukan ayam lokal pedaging unggulan (ALPU) yang merupakan hasil persilangan ayam jawa atau ayam kampung dengan kualitas genetik yang baik dan telah mengalami pemuliaan sehingga untuk performa pertumbuhannya lebih baik dari ayam kampung kebanyakan.

Hal tersebut membuat LKM BMT Trans Ngudi Makmur memfokuskan pelatihan budidaya ternak ayam ALPU untuk penggemukan pada tujuan akhirnya. Alasan LKM BMT Trans Ngudi Makmur memilih memberikan pelatihan pada komoditas ayam kampung ini adalah karena cepatnya pertumbuhan, yaitu kurang lebih 55 hari dan bobot dapat mencapai sekitar 0,8 kg per ekor. Jika dibandingkan dengan ayam kampung biasa yang hanya mampu mencapai 0,6 kg per ekor pada umur yang sama. Jelas hal tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki dan tentunya akan sangat menguntungkan bagi peternaknya. Melihat dari manfaat tersebut LKM BMT Trans Ngudi Makmur melakukan penyuluhan informasi kepada masyarakat untuk melakukan budidaya penggemukan ayam alpu dengan segala keunggulannya dan selanjutnya memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mampu membudidayakan kegiatan ternak pada komoditas ayam alpu.

Bidang kuliner menjadi sasaran terakhir dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan mengolah hasil pertanian dan peternakan untuk mempunyai nilai lebih yang mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat transmigrasi lokal. Produk olahan yang telah dihasilkan dari bidang pertanian adalah sirup rosella, dodol rosella, dan pada bidang peternakan adalah olahan ayam bakar, dengan setiap produk mempunyai keistimewaan dan ciri khas masing-masing, sehingga produk yang telah

dihasilkan tersebut akan menjadi produk khas yang dimiliki oleh masyarakat transmigrasi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat transmigrasi lokal yaitu Bapak Sugiman (52 thn) mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya dampak yang dirasakan terhadap adanya implementasi strategi pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan pelatihan yang sudah diberikan adalah sebagai berikut:

“Pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat dan saya sekarang mempunyai ketrampilan dalam beberapa bidang seperti pertanian, dan peternakan. Untuk bidang kuliner digeluti istri saya karena saya beralasan kalau perempuan yang mempunyai ketrampilan memasak di dapur.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan adanya penambahan kemampuan dalam ketrampilan di beberapa bidang. Ditinjau dari aspek tahapan menurut Sulistiyani (2004: 83-84) pemberdayaan masyarakat bahwa proses pemberdayaan terhadap masyarakat transmigrasi lokal pada pemberdayaan sumber daya manusia telah mencapai tahapan transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan pemberian ketrampilan dasar, sehingga masyarakat dapat mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan untuk kehidupan yang lebih baik.

3. Pemberdayaan Aset Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bekti selaku Manajer LKM BMT Trans Ngudi Makmur:

“Implementasi strategi pemberdayaan yang ketiga itu adalah pemberdayaan masyarakat dalam aset keuangan untuk memberikan kemudahan mengakses modal. LKM BMT Trans Ngudi Makmur juga tidak hanya ingin berperan dalam jasa keuangan saja tetapi perlu adanya pembinaan terhadap masyarakat

itu juga perlu dilakukan. Kegiatan lainnya yang dilakukan yaitu melakukan pengembangan dan pendampingan usaha untuk memajukan usaha masyarakat transmigrasi lokal yang sudah ada. Diharapkannya usaha mereka akan berjalan secara terus menerus atau berkelanjutan, karena itu adalah sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu LKM BMT Trans Ngudi Makmur tidak hanya memberikan kemudahan dalam akses modal tapi juga benar-benar memastikan usaha itu akan berjalan dengan kemampuan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi lokal itu semakin bertambah melalui pengembangan dan pendampingan usaha itu sendiri. Sebelum membina kami melihat masyarakat transmigrasi lokal itu sebagai produsen suatu produk dan konsumen yang masih belum mampu membeli produk.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Becti yang bertanggungjawab atas implementasi strategi pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal Ring – 1 Karangsewu adalah setelah dilakukan serangkaian implementasi kegiatan pemberdayaan yang berupa refleksi kemiskinan dan pemberdayaan sumber daya manusia maka tahapan selanjutnya adalah pemberdayaan aset keuangan melalui pengembangan dan pendampingan usaha yang lebih memfokuskan kepada pengembangan usaha yang telah dirintis sebelumnya, yaitu pengembangan usaha di bidang kuliner untuk mendukung dan mensejahterakan masyarakat transmigrasi lokal melalui kegiatan usaha perekonomian dibidang pertanian dan peternakan. Kegiatan kuliner ini bertujuan mengupayakan kesejahteraan masyarakat transmigrasi lokal melalui implementasi dalam pengolahan pada bidang pertanian dan peternakan untuk nilai tambah bagi produk kedua bidang tersebut dan memberikan kemudahan dalam akses permodalan usaha.

Pemberdayaan aset keuangan yang secara bersinergian mencoba mengatasi masalah yang pada umumnya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan melalui kemudahan akses peminjaman modal usaha untuk masyarakat. Untuk tidak mencampuradukkan permasalahan maka tawaran

pendekatan yang dilakukan LKM BMT Trans Ngudi Makmur sebelum memulai implementasi pengembangan dan pendampingan usaha adalah dengan melihat sisi kehidupan masyarakat transmigrasi lokal dari dua sisi : Pertama, sebagai penduduk aktif maka kegiatan ekonomi baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa harus kita perlakukan sebagai usaha mikro sehingga tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kapasitas produktifnya; Kedua, sebagai rumah tangga konsumen setiap pendapatan/ pengeluaran masyarakat yang masih belum melampaui batas garis kemiskinan harus kita perlakukan sebagai penduduk miskin yang harus kita tingkatkan kondisi kehidupannya hingga melewati batas tersebut.

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat transmigrasi lokal yaitu Bapak Suyoto (33 thn) mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya dampak yang dirasakan terhadap adanya implementasi strategi pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan aset keuangan adalah sebagai berikut:

“Ada manfaat yang saya rasakan dalam kegiatan pemberdayaan aset keuangan, apalagi saya termasuk orang baru dalam membina keluarga jadi dengan kemudahan akses permodalan yang diberikan dan pengembangan, pendampingan usaha yang dilakukan LKM BMT Trans Ngudi Makmur sangat membenatu keadaan perekonomian keluarga saya dan berpernagruh positif bagi masyarakat transmigrasi lokal, khususnya saya sendiri. Manfaat itu banyak juga saya rasakan untuk kegiatan sekolah anak saya dalam hal pinjaman kebajikan.”

Sebagaimana diketahui LKM BMT Trans Ngudi Makmur berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal, maka sudah sewajarnya apabila tugas lembaga keuangan mikro melakukan kegiatan-kegiatan keuangan (*micro finance*) yakni penyedia jasa keuangan bagi anggotanya yang

berprofesi sebagai pengusaha mikro maupun kecil. Pada umumnya, LKM BMT memberikan jasa keuangan dalam bentuk simpanan, pembiayaan, dan jasa-jasa lain seperti penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh. Berkaitan dengan hal tersebut, LKM BMT Trans Ngudi Makmur menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali melalui pemberian pembiayaan yang bertujuan menjadi lembaga pembiayaan bagi pengusaha mikro dengan kemudahan prosedur dan jangkauan layanannya.

LKM BMT Trans Ngudi Makmur dalam perannya sebagai penyedia jasa modal usaha untuk pengembangan usaha mikro di kawasan transmigrasi adalah dengan melalui produk tabungan atau *funding* dan pembiayaan atau *financing*. Pada produk *funding* adalah sebagai berikut :

1) Tabungan

a) Tamam (Tabungan Mitra Muamalah)

Jenis tabungan ditujukan untuk kalangan umum.

b) Taawun (Tabungan untuk Tolong-Menolong)

Jenis tabungan yang ditujukan hanya untuk anggota.

2) Deposito

Merupakan produk *funding* dengan setoran minimal Rp. 100.000,- dan kelipatannya serta menggunakan akad mudharabah.

Selanjutnya adalah produk *financing* yang ditujukan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja. Oleh karena sifatnya jual beli maka transaksi ini harus memenuhi rukun jual beli. Dilihat dari segi manfaatnya sistem jual beli ini dapat dibagi menjadi : *Al murabahah* dan *Al Ijarah*.

a) *Al murabahah*

Pembiayaan *Al Murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi masyarakat transmigrasi lokal. Jual beli ini dapat berlaku secara umum untuk semua barang yang dapat diakadkan seketika terjadi transaksi.

b) *Al Ijarah*

Merupakan akad perpaduan antara sewa dengan jual beli. Yakni sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. LKM BMT Trans Ngudi Makmur sebagai penyedia barang pada hakikatnya tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya pembelian, dan di akhir waktu setelah lunas barang menjadi milik anggota nasabah.

2) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jasa

Pada pembiayaan ini biasanya dalam bentuk *Al Hiwalah* yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam prakteknya *Al Hiwalah* ini berupa *factoring* atau anjak piutang yakni mitra atau anggota yang memiliki piutang

mengalihkan piutang tersebut kepada LKM BMT Trans Ngudi Makmur dan LKM BMT Trans Ngudi Makmur membayarkan kepada mitra dan LKM BMT Trans Ngudi Makmur akan menagih kepada orang yang berhutang.

3) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Kerja Sama

Merupakan pembiayaan kepada anggota atau mitra LKM BMT Trans Ngudi Makmur yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar LKM BMT Trans Ngudi Makmur akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil.

4) Pinjaman Kebajikan

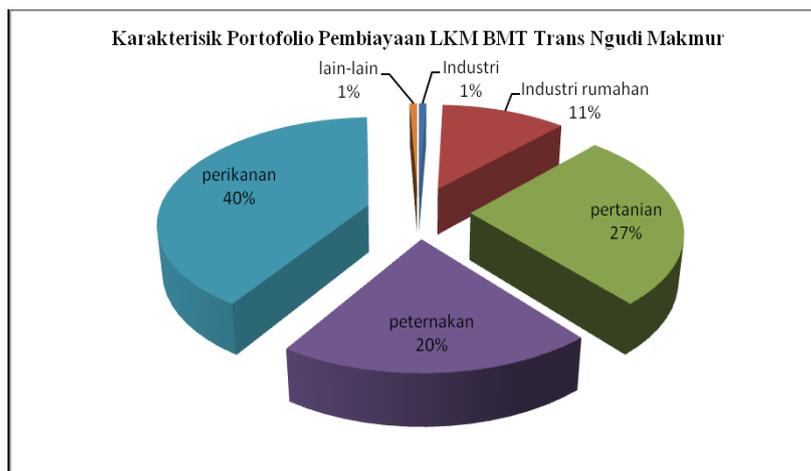
Pembiayaan yang diberikan kepada mitra LKM BMT Trans Ngudi Makmur yang tujuannya untuk kebajikan (tolong-menolong), sehingga besarnya pengembalian pinjaman adalah sama dengan besarnya pinjaman.

Pengembangan dalam usaha untuk mendorong usaha mikro ini memang disadari bahwa modal bukan satu-satunya pemecahan, tetapi tetap saja bahwa ketersediaan permodalan yang secara mudah dapat dijangkau masyarakat transmigrasi lokal sangat penting, karena pada dasarnya kelompok inilah yang masuk sebagai kategori masyarakat kecil yang menjadi korban dalam mengembangkan kemampuannya dengan keterbasan akses permodalan.

Adanya pasar keuangan yang sehat tidak lepas dari kelembagaan keuangan yang hadir ditengah masyarakat dan oleh karena itu LKM BMT Trans

Ngudi Makmur memberikan dukungan permodalan yang khusus ditujukan bagi masyarakat kecil. Seperti diketahui bahwa LKM BMT Trans Ngudi Makmur mempunyai portofolio pembiayaan yang lebih besar ke bidang pertanian dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya, yaitu sebesar 70% ke bidang pertanian dan 30% di bidang perdagangan dan industri kecil. Pada tahun 2014 sektor perikanan memiliki persentase paling besar yaitu 40%, sektor pertanian 27%, sektor peternakan 20%, sektor industri rumahan 11%, sedangkan sektor industri dan sektor lain-lain sebesar 1%. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Karakteristik Portofolio Pembiayaan LKM BMT Trans Ngudi Makmur



Analisis Data Sekunder

Selain program pengutan pada usaha mikro melalui kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro, LKM BMT Trans Ngudi Makmur juga melakukan penguatan pada hasil olahan produk dengan melakukan pendampingan dan pengembangan usaha produk unggulan masyarakat transmigrasi lokal akan membuat masyarakat transmigrasi lokal memiliki olahan produk unggulan, sehingga akan membuat siklus dalam kegiatan perekonomian tidak berhenti pada

produk mentah. Di sisi lain pemberdayaan aset modal keuangan melalui program pendampingan dan pengembangan usaha dilakukan sebagai langkah upaya untuk menguatkan masyarakat selain pada sisi modal juga sisi kekuatan dari produk olahan usaha masyarakat yang telah dihasilkan dari bidang pertanian dan peternakan.

Kegiatan pengembangan dan pendampingan usaha produk masyarakat sebagai salah satu komponen dalam program pemberdayaan aset keuangan yang dimaksudkan selain untuk memberikan stimulus bagi masyarakat guna menjalankan usaha perekonomian juga mampu memberikan mereka bekal tentang potensi di sekitarnya untuk mampu mengolah dan menghasilkan nilai daya jual yang tinggi sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perekonomian. Sebagaimana diketahui bahwa pada komponen peningkatan SDM telah dilakukan kegiatan dengan pembekalan pelatihan-pelatihan ketrampilan dibidang pertanian, peternakan, dan kuliner.

Bidang pertanian jika sebelumnya pada pemberdayaan sumber daya manusia telah dilakukan kegiatan pelatihan budidaya pertanian organik dan pelatihan budidaya pada komoditas pepaya california, maka dalam implementasi program pemberdayaan aset keuangan melalui kegiatan pengembangan usaha keluaran target yang akan dihasilkan adalah masyarakat petani transmigrasi lokal mempunyai hasil produk pertanian unggulan dan mampu mengembangkan budidaya komoditas selain pepaya california seperti, komoditas sayuran, komoditas buah naga, dan semua produk komoditas pertanian masyarakat transmigrasi lokal tetap diarahkan untuk mampu berkomitmen pada budidaya

secara organik. LKM BMT Trans Ngudi Makmur memberikan pelatihan budidaya pertanian organik adalah dengan alasan mempunyai jejaring mitra dalam pasar yang membutuhkan produk pertanian organik, sehingga masyarakat akan diberdayakan juga melalui pemasaran produk dan keuntungan lainnya juga adalah komoditas pertanian organik mempunyai nilai daya jual lebih karena jangkauan target pasar yang menengah keatas atau dapat dikatakan pasar modern yaitu supermarket.

Pada bidang peternakan kegiatan program pengembangan dan pendampingan usaha yang dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk terbentuknya sistem peternakan yang terintegrasi dengan adanya budidaya indukan ayam lokal pedaging unggulan (ALPU), dimana sebelumnya telah ada kegiatan penggemukan pada ayam lokal pedaging unggulan. Sehingga dengan adanya kegiatan budidaya indukan ayam akan melengkapi siklus kegiatan peternakan yang telah dibentuk pada kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk perputaran kegiatan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi lokal. Selanjutnya bidang kuliner melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan kreativitas dalam produknya dengan menghasilkan beberapa aneka olahan selain yang sudah ada, seperti olahan makanan dengan hasil dari laut yang akan menjadi produk unggulan dengan potensi letak wilayah geografis masyarakat transmigrasi lokal memang berada di pesisir pantai.

Ditinjau dari aspek tahapan menurut Sulistiyani (2004: 83-84) pemberdayaan masyarakat aset keuangan, maka masyarakat transmigrasi lokal telah mencapai tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, dan

keampilan dengan adanya hasil produk unggulan dibidang pertanian, peternakan, kuliner yang dimiliki masyarakat transmigrasi lokal. Dengan adanya produk unggulan yang dimiliki masyarakat transmigrasi lokal akan membawa masyarakat pada tanggungjawab yang lebih besar untuk mampu dan mempunyai rasa ingin selalu mengembangkan diri ke arah yang lebih positif demi kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi lokal.

4. Pemberdayaan Aset Sosial

Selain melakukan pelatihan-pelatihan di bidang sumber daya manusia dan pendampingan usaha melalui kemudahan akses permodalan usaha. Pada bagian selanjutnya adalah program yang dijalankan juga melakukan pendampingan usaha, akan tetapi melalui kemudahan dalam memberikan koneksi atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan sosial, informasi akses pemasaran produk yang telah dihasilkan masyarakat transmigrasi lokal.

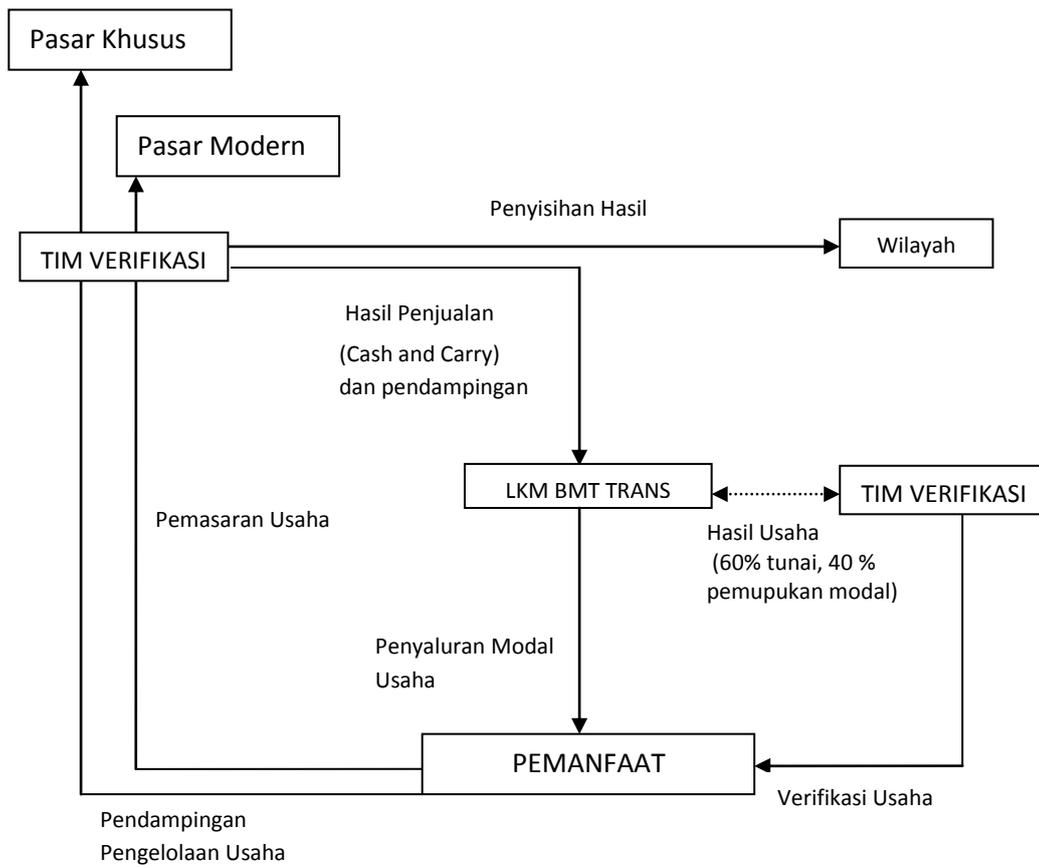
Pada dasarnya masyarakat transmigrasi lokal telah memiliki aset sosial berupa hubungan sosial secara individual yang terbentuk secara mendasar dan kuat karena atas dasar kesamaan nasib, yaitu sebagai transmigran lokal. Aset sosial yang sudah dimiliki oleh masyarakat transmigrasi lokal itu akan sangat menguntungkan LKM BMT Trans Ngudi Makmur dalam mengimplementasikan strategi pemberdayaan masyarakat karena hubungan sosial masyarakat transmigrasi lokal yang terjalin cukup baik dan erat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bakti selaku Manajer LKM BMT Trans Ngudi Makmur mengenai pemberdayaan aset sosial adalah:

“Pemberdayaan kali ini, LKM BMT Trans Ngudi Makmur sangat diuntungkan dengan adanya aset sosial awal yang sudah dimiliki oleh masyarakat transmigrasi lokal itu sendiri, sehingga kami hanya tinggal memberdayakannya saja. Aset sosial masyarakat transmigrasi lokal adalah hubungan antara satu warga masyarakat transmigrasi lokal dengan warga lainnya yang masih berstatus sebagai masyarakat transmigrasi lokal cukup erat dan rukun. Langkah selanjutnya, LKM BMT Trans Ngudi Makmur memanfaatkan aset sosial yang sudah dimiliki oleh masyarakat transmigrasi lokal itu untuk diarahkan kepada proses pemasaran produk untuk memberikan jaringan komunikasi untuk bermitra dengan pasar.”

Sasaran dalam pemberdayaan aset sosial adalah pendampingan proses pemasaran yang bertugas memastikan adanya pasar untuk produk hasil dibidang pertanian dan peternakan. LKM BMT Trans Ngudi Makmur, selain bertugas dalam pendampingan proses pemasaran juga mempunyai fungsi dalam peran pemberdayaan dana proteksi pasar, penyaluran modal usaha dan dana alokasi keuntungan untuk pengembangan wilayah kawasan transmigrasi lokal.

Tujuan utama dalam pokok kerja pendampingan proses pemasaran memang memastikan adanya akses jaringan kemitraan usaha dan informasi peluang pasar yang menerima produk masyarakat transmigrasi lokal dibidang peternakan dan pertanian, tetapi LKM BMT Trans Ngudi Makmur juga harus memberdayakan keadaan sosial di lingkungan masyarakat transmigrasi lokal selain pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan. Pemberdayaan sosial dalam hal ini adalah penyisihan hasil keuntungan untuk pengembangan wilayah kawasan transmigrasi lokal dalam infrastruktur, seperti pemerataan jalan aspal dan renovasi masjid, untuk lebih lanjut kegiatan alur dalam proses pemasaran adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Pola Jaringan Kemitraan Usaha dan Pendampingan Pemasaran

Dari pola jaringan kemitraan usaha dan pendampingan yang dilakukan oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur dapat diketahui bahwa aktivitas penyaluran produk ke pasar terjadi pada dua jenis pasar, yaitu pasar modern dan pasar khusus. Pasar modern yang dimaksudkan adalah seperti supermarket, sedangkan untuk pasar khusus adalah penyaluran produk kepada seseorang yang bekerja sebagai pemasok atau disebut *supplier* buah dan sayuran dipasar-pasar besar di Yogyakarta atau penyaluran produk secara langsung kepada pasar tradisional yang dilakukan oleh masyarakat transmigrasi lokal. Pada pasar modern dan pasar khusus, pola hubungan sistem kerjasama yang dibangun adalah dengan kontrak kerja yang tidak terlalu mengikat, hanya mempunyai kriteria syarat bahwa

produk harus dibudidayakan secara organik dan tidak ada cacat fisik pada produk yang dikirimkan. Selama persyaratan ini masih mampu dipenuhi oleh masyarakat yang bertindak sebagai produsen, maka keterkaitan secara fungsional akan berjalan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat transmigrasi lokal yaitu Bapak Rubingun (48 thn) mengungkapkan bahwa ada atau tidaknya dampak yang dirasakan terhadap adanya implementasi strategi pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan aset sosial sebagai berikut:

“Saya merasakan manfaatnya ketika hasil lahan saya sudah ada pasar yang siap menerimanya walaupun ada sebagian keuntungan yang disepakati dengan pihak LKM BMT Trans Ngudi Makmur untuk dialokasikan kearah pembangunan wilayah kawasan transmigrasi lokal. Bagi saya tidak ada masalah selama untuk kepentingan bersama.”

Berdasarkan pernyataan salah satu masyarakat mengenai pemberdayaan aset sosial maka dapat diketahui bahwa masyarakat merasa sangat terbantu dengan jaringan mitra usaha yang diberikan dan merasa tidak keberatan dalam penyisihan sebagian hasil untuk pembangunan wilayah. Hal tersebut dikarenakan modal sosial yang berupa hubungan di dalam masyarakat transmigrasi lokal itu sudah terbangun erat, sehingga tidak ada masalah bagi LKM BMT Trans Ngudi Makmur dalam implementasi strategi pemberdayaan masyarakat selama program yang diberikan untuk kemanfaatan bersama.

Ditinjau dari aspek tahapan tingkat pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004: 83-84), maka pemberdayaan aset sosial pada tahapan konatif dapat dikatakan masyarakat transmigrasi lokal ring 1 Desa Karangsewu telah berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat

pada kemandirian ekonomi masyarakat selama pemasokan produk ke pasar modern masih mampu berjalan baik dan lancar dengan selalu mengupayakan pengembangan ketrampilan dasar untuk menghasilkan produk terbaik masih menjadi komitmen masyarakat tentunya keterkaitan pasar akan berjalan dengan berkelanjutan. Masyarakat transmigrasi lokal juga diarahkan untuk tidak lupa pada pembangunan lingkungan wilayah tempat tinggal mereka dengan mengalokasikan beberapa dana untuk pembangunan wilayah dalam menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal mereka yang dapat dilihat pada gambar 8. Pola jaringan kemitraan usaha dan pendampingan pemasaran.

D. Analisis Pencapaian Keberdayaan Masyarakat

Dalam evaluasi pencapaian keberdayaan masyarakat yang akan dianalisis lebih mengarah pada *outcome* atau hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dilaksanakan daripada *output* atau keluarannya secara langsung. *Outcome* yang dimaksud terdiri dari perubahan kesadaran masyarakat, lingkup pemberdayaan yang terjadi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur di kawasan masyarakat transmigrasi lokal, dan yang terakhir dilakukan evaluasi keberdayaan masyarakat.

1. Analisis Perubahan Kesadaran Masyarakat

Perubahan kesadaran masyarakat lebih merupakan dampak dari serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dalam refleksi kemiskinan, pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan aset keuangan dan pemberdayaan aset sosial. Analisis mengenai dampak dari pemberdayaan masyarakat ini tidak bisa dihitung berdasarkan peningkatan jumlah

atau angka partisipasi, kuantitas finansial, maupun kuantitas fisik terbangun serta indikator-indikator lainnya, tetapi lebih kepada pencapaian sasaran akhir program yang dapat diukur salah satunya dari peningkatan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan yang mengacu pada teori yang digunakan. Untuk itu tingkat perubahan kesadaran ini dapat dianalisis dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisinya saat ini, tumbuhnya motivasi untuk melakukan perubahan menjadi kondisi yang lebih baik serta pengakuan terhadap hasil kegiatan yang telah mereka laksanakan sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat transmigrasi lokal yang bernama Bapak Abdulloh Hamid (38 thn) dalam perubahan kesadaran adalah sebagai berikut:

“Saya merasakan banyak manfaatnya ketika adanya program pemberdayaan masyarakat oleh LKM BMT Trans Ngudi makmur selain dari pembiayaan modal usaha karena yang datang juga banyak dan dengan adanya beberapa pelatihan saya menjadi mengerti berbudidaya pertanian organik dan berbudidaya ayam lokal pedaging unggulan. Saya juga jadi mengenal akan pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal saya yang memang akan terasa dampaknya kalau tidak dijaga dengan benar. Kegiatan dari LKM BMT Trans Ngudi Makmur santai tidak kaku dan pernah diadakan rapat sambil bebarengan dengan kemlompok musik gamelan warga, pengajian, ngopi bahkan buka puasa bareng.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat transmigrasi lokal terhadap masalah kemiskinan dan pembangunan lingkungannya cukup tinggi. Kesadaran masyarakat itu dapat dilihat dari kepedulian dan tingginya angka partisipasi dalam serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan juga didukung oleh basis nilai-nilai agama yang melekat kuat dalam kawasan transmigrasi lokal ring 1 Karangsewu. Keaktifan dalam kegiatan refleksi kemiskinan yang dapat menyimpulkan tentang kriteria

masyarakat miskin menurut masyarakat transmigrasi lokal adalah dengan menentukan indikator kemiskinan melalui ada atau tidaknya seseorang mempunyai pekerjaan yang mampu membantu perekonomian masyarakat.

Dikaitkan dengan teori siklus pemberdayaan menurut Wilson, 1996 (dalam Setyowati, 2013), maka pada tahapan ini masyarakat sudah melewati tahap kedua yaitu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya atau komunitasnya dan tahap ketiga yaitu menerima kebebasan tambahan dan tanggungjawab yang lebih besar. Melepaskan halangan yang dimaksudkan yaitu pemahaman masyarakat terhadap hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan diri dan komunitasnya untuk kemudian mengidentifikasi potensi dan peluang apa saja yang bisa digunakan untuk melepaskan halangan-halangan yang ada. Dengan demikian masyarakat sudah melalui tahapan kesadaran terhadap masalah kemiskinan untuk meningkatkan perekonomian melalui adanya pekerjaan yang layak untuk warga masyarakat transmigrasi lokal.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan juga terlihat dari kekritisannya warga dalam menyampaikan usulan atau kritik terhadap program-program yang dijalankan. Meskipun apabila dilihat secara lebih dekat dapat diketahui bahwa warga yang kritis hanya personil itu-itu saja yang merupakan kelompok elite warga yang antara lain terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan pegawai, namun adanya kelompok warga yang kritis bisa dijadikan sebagai pendorong dan pemacu

serta sumber pembelajaran bagi anggota masyarakat yang lain untuk lebih peduli terhadap permasalahan dalam komunitasnya.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi juga nampak dari program-program yang sifatnya general dan tidak hanya menguntungkan satu kelompok saja yang disambut positif oleh masyarakat transmigrasi lokal. Program yang sifatnya general terlihat dari, pemberdayaan aset sosial dengan adanya dana yang dialokasikan dalam pembangunan pemerataan untuk semua wilayah kawasan transmigrasi lokal.

Dalam program pemberdayaan aset keuangan juga memberikan kemudahan dalam jenis produk pembiayaan yang bersifat pinjaman kebajikan dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan pinjaman disaat mengalami gagal panen sehingga mengakibatkan warga kesulitan dalam pembiayaan hidup, maka LKM BMT Trans Ngudi makmur berperan dalam kebajikan dana untuk membantu yang dialokasikan dana untuk keberlangsungan hidup masyarakat transmigrasi lokal dan dana pendidikan sehingga nantinya tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Dilihat dari sasaran program hal ini sudah tepat sasaran karena sasaran utama dalam kegiatan yang dilaksanakan adalah masyarakat miskin dan kelompok lainnya yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, sehingga prioritas dalam menentukan kegiatan sudah mengacu pada kegiatan yang dampaknya dapat mengurangi kemiskinan masyarakat transmigrasi lokal.

Motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik secara umum cukup tinggi, dimana masyarakat bersedia secara sukarela

terlibat dan menjadi bagian program tanpa upah atau insentif apapun, walaupun kenyataannya adalah peran tersebut dilakukan oleh tokoh elite masyarakat seperti, perangkat desa. Di sisi lain dari aspek kemandirian yang dimiliki masyarakat masih belum cukup kuat, hal ini dapat dilihat dari sering adanya keluhan terhadap peran fasilitator. Tahun 2014 antusias masyarakat dalam konsistensi mengelola program berkurang, sehingga bisa dikatakan masyarakat transmigrasi lokal masih belum cukup mandiri dan masih memerlukan dukungan pihak lain untuk menjaga agar motivasi yang dimiliki masyarakat transmigrasi lokal tidak hilang atau padam.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui refleksi kemiskinan, pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan aset keuangan dan pemberdayaan aset sosial cukup baik, disamping itu masyarakat juga menyatakan kepuasannya terhadap proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dirasakan dapat menumbuhkan kembali jiwa dan semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat transmigrasi lokal. Dengan adanya motivasi dan pengakuan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan yang ada di kawasan transmigrasi lokal, maka dilihat dari aspek siklus pemberdayaan hal ini menunjukkan adanya perubahan perilaku dan kesan masyarakat yang dapat membawa dirinya menuju kepada kondisi yang lebih baik.

2. Analisis Lingkup Pemberdayaan

Melalui rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM BMT Trans Ngudi Makmur, maka masyarakat transmigrasi lokal dapat dikatakan telah cukup berhasil menjalankan agenda-agenda pemberdayaan yang diprogramkan, namun untuk dapat dikatakan berdaya maka perlu terlebih dahulu dilakukan analisis pada masing-masing lingkup pemberdayaan.

Dalam analisis tingkatan pemberdayaan kali ini mengacu pada teori menurut Alshop dan Heinshon menurut Ndraha (dalam Sumaryadi, 2005) untuk analisis pemberdayaan mencakup tiga hal yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Analisis terhadap elemen-elemen pemberdayaan masyarakat disini tidak secara langsung menilai tingkat capaian atau keluaran masing-masing kegiatan namun lebih mengarah pada dampaknya pada masing-masing elemen pemberdayaan tersebut.

a. Pemberdayaan Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Becti selaku Manajer LKM BMT Trans Ngudi Makmur mengenai pemberdayaan lingkungan, yaitu:

“Kalau pemberdayaan yang fokus kepada lingkungan memang tidak ada. Tetapi dalam setiap implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diusahakan kita melihat faktor lingkungan, misalnya pada pelatihan budidaya pertanian organik, maka secara tidak langsung pelatihan tersebut tentunya mempunyai suatu alasan yaitu menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai. Kemudian selanjutnya pihak LKM BMT Trans Ngudi Makmur juga melakukan pembangunan di lingkungan masyarakat transmigrasi lokal seperti pengecoran jalan untuk setiap gang karena tidak adanya bantuan dari Pemerintah, maka kami ajaklah masyarakat untuk berswadaya semampunya kemudian sisanya kami yang mengganggu. Berbeda pada pembangunan jalan aspal pada jalan akses utama menuju desa adalah dana bantuan Pemerintah Provinsi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pada tahun awal terbentuknya LKM BMT Trans Ngudi Makmur berkomitmen untuk fokus membangun kepada penataan jalan lingkungan yang kondisi awalnya masih tanah dan berpasir yang selanjutnya dibangun jalan menjadi jalan cor untuk setiap gang yang masuk kerumah warga, dan dilakukan pengaspalan untuk jalan utama. Semua dana dalam pembangunan infrastruktur dalam hal penataan jalan adalah dengan bantuan dari LKM BMT Trans Ngudi Makmur dan dana swasembada masyarakat transmigrasi lokal yang juga dibantu oleh Pemerintah Provinsi. Dengan penataan jalan lingkungan, maka mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan lingkungan terlihat rapi dan tertata.

Pemberdayaan lingkungan adalah pendekatan dalam pengelolaan atau manajemen pembangunan lingkungan dimana masyarakat diharapkan memiliki keberdayaan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembangunan lingkungan disekitar tempat tinggalnya. Pemberdayaan lingkungan sebagai salah satu komponen yang diperhatikan dalam implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur di kawasan transmigrasi lokal menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia yang mampu menjaga kelestarian lingkungan pantai dengan budiaya pertanian secara organik. Ditinjau dari aspek landasan teori mengenai lingkup dan tingkatan pemberdayaan maka masyarakat kawasan transmigrasi lokal sudah mampu dan memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan tetap memanfaatkan alam tetapi tidak merusaknya.

Program-program yang disusun dalam pemberdayaan masyarakat yang dalam implementasinya di bidang pemberdayaan lingkungan sudah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian sebagian besar program pembangunan yang direncanakan masih mengandalkan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah, LKM BMT Trans Ngudi Makmur sebagai sumber pembiayaan utama, sehingga ditinjau tingkat kemandirian bisa dikatakan kemandirian masyarakat masih kurang.

Dalam pemberdayaan lingkungan, masyarakat dituntut untuk mampu merencanakan dan mengelola kegiatan pembangunan di lingkungannya tidak sekedar dalam hal teknis semata namun juga mampu untuk merencanakan semua aspek dalam pembangunan tersebut, termasuk aspek pembiayaannya. Selama ini sudah ada upaya untuk mengakses pembiayaan dari sektor swasta atau sumber pembiayaan lainnya tetapi hal tersebut akan berjalan jika adanya campur tangan pihak LKM BMT Trans Ngudi Makmur.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan di kawasan transmigrasi lokal dilihat dari sisi praktis memang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinilai mampu untuk mengatasi sebagian permasalahan yang selama ini dirasakan, namun untuk membangun sebuah lingkungan masyarakat agar benar-benar tertata dan menjadi masyarakat yang lebih maju maka diperlukan suatu konsep penataan lingkungan yang terpadu dan komprehensif. Perencanaan pembangunan belum terdapat skenario yang secara jelas sistematis untuk pembangunan kawasan transmigrasi lokal tersebut, sehingga program-program

kegiatan yang muncul sangat dimungkinkan bersifat pragmatis dan tidak berkelanjutan.

b. Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bekti selaku Manajer LKM BMT Trans Ngudi Makmur mengenai pemberdayaan sosial, yaitu:

“Kami berusaha melakukan beberapa contoh kegiatan sosial untuk masyarakat transmigrasi lokal, diantaranya dalam menjamin produk sampai pasar, kemudian di bidang pendidikan adanya beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi dan menyediakan perpustakaan kecil, kemudian bidang kesehatan kami juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo untuk melakukan kunjungan cek kesehatan bagi masyarakat transmigrasi lokal.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dalam implementasi pemberdayaan masyarakat termasuk sangat baik dimana terdapat proses pendampingan dalam pemasaran suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat transmigrasi lokal untuk dapat memastikan adanya pasar yang mampu menerima produk tersebut. Secara tidak langsung kegiatan pendampingan pemasaran produk akan membantu dalam hal peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keterjaminan produk yang dihasilkan masyarakat transmigrasi lokal. Di sisi lain kegiatan yang bersifat sosial juga dilakukan oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur dalam bidang kesehatan, seperti penyuluhan kesehatan ibu hamil, penyuluhan KB, pelayanan pengobatan. Semua kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan sosial bidang pendidikan juga dilakukan, seperti beasiswa untuk anak yang kurang mampu dan pendirian perpustakaan kecil bagi anak-anak berpendidikan Sekolah Dasar.

Dari keluaran proses pemberdayaan sosial di kawasan transmigrasi lokal cukup baik karena sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat sebagaimana hasil dari forum *Focus Group Discussion*. Namun dokumen perencanaan hingga monitoring evaluasi tidak ada sehingga tidak adanya kegiatan yang memuat secara detail skenario dan strategi pelaksanaannya. Strategi dan skenario yang dimaksudkan adalah sebagai panduan dalam melakukan prioritas dan acuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial sehingga sasaran yang direncanakan benar-benar tercapai.

Permasalahan program-program pembangunan yang sering terjadi adalah masalah pembiayaan sehingga hal tersebut akan berdampak pada terlaksananya atau tidak kegiatan tersebut. Tidak demikian yang terjadi di masyarakat transmigrasi lokal yang dalam proses pemberdayaan modal sosial dapat dilihat pada gambar 8. pola jaringan kemitraan usaha dan pendampingan pemasaran dengan adanya dana yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah kawasan transmigrasi lokal, sehingga tidak begitu berpengaruh dalam kegiatan pelaksanaannya.

Kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah terlaksana dalam pemberdayaan sosial sebagian besar adalah kegiatan yang diprogramkan oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur dan bersifat general serta dilaksanakan di kawasan transmigrasi lokal. Sedangkan kegiatan pembelajaran murni muncul dari inisiatif masyarakat belum ada, kemudian juga dokumen perencanaan dengan agenda pelatihan atau pembelajaran masyarakat tidak ada catatan yang jelas. Dari hal tersebut dapat

dikatakan bahwa masyarakat transmigrasi lokal belum efektif dalam pembelajaran bagi semua masyarakatnya.

c. Pemberdayaan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bekti selaku Manajer LKM BMT Trans Ngudi Makmur mengenai pemberdayaan ekonomi, yaitu:

“Menegenai pemberdayaan di bidang ekonomi adalah jelas bahwa kami memberikan kemudahan dalam mengakses permodalan untuk usaha masyarakat transmigrasi lokal. Selain itu juga pihak LKM BMT Trans Ngudi Makmur melakukan pembiaanaan usaha yang jelas komoditasnya sudah siap diterima dan apalagi jika sangat dibutuhkan oleh pasar, maka hal itu sangat berpeluang sekali untuk dilakukan pembinaan. Apalagi aset yang dimiliki oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur sekarang mencapai kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan dana awal swadaya masyarakat saat itu kurang lebih ada Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu komponen dalam kegiatan pemberdayan masyarakat yang dilakukan kepada masyarakat transmigrasi lokal dimaksudkan untuk memberikan stimulus bagi masyarakat guna menjalankan usaha perekonomian sehingga diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud berupa pengelolaan dan kemudahan dalam akses peminjaman modal serta pembinaan usaha yang dikelola oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur.

Kegiatan perguliran aset LKM BMT Trans Ngudi Makmur termasuk dalam keadaan yang bagus dimana hasil aset yang dimiliki sekarang sekitar RP. 500.000.000 dari modal awal dana swadaya masyarakat sendiri dengan jumlah Rp. 8.000.000,- rupiah. Kemajuan dalam pengelolaan keuangan ini tidak lepas

dari komitmen dan kerjasama yang baik antara pihak LKM selaku pengelola perguliran dana dan itikad baik dari semua anggota masyarakat untuk menjalankan sistem dana bergulir tersebut.

Kondisi pengelolaan perguliran dana pinjaman di kawasan transmigrasi lokal yang cukup baik saat ini tidak lepas dari dukungan kegiatan pembinaan usaha yang optimal dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam mengakses permodalan dalam mengajukan pinjaman dengan menyesuaikan dana yang dibutuhkan dengan skala usaha yang akan dikembangkan. Aspek dalam pembinaan usaha lainnya yang telah dilakukan adalah diversifikasi usaha dan bantuan mengakses jaringan pemasaran serta informasi-informasi bisnis dunia luar.

Sasaran dari pemberdayaan ekonomi ini sebenarnya adalah meningkatnya kapasitas masyarakat untuk mengakses peluang-peluang dan mengelola sumber daya perekonomian yang tersedia, melalui pemberian stimulus dan pembinaan usaha secara intensif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat dikatakan berdaya secara ekonomi ketika mereka mampu menjalankan roda perekonomian secara baik, efektif dan efisien. Kondisi semacam itu sudah mulai nampak dalam kawasan transmigrasi lokal karena keberadaan stimulus dana yang dibarengi pembinaan usaha secara terpadu oleh LKM BMT Trans Ngudi Makmur.

Salah satu cara melihat tingkat kesejahteraan masyarakat transmigrasi lokal adalah dengan melakukan wawancara untuk mengetahui tentang besaran pendapatan dan keadaan rumah sebagai tempat tinggal dari beberapa masyarakat transmigrasi lokal. Pendapatan masyarakat transmigrasi lokal semakin meningkat

maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi lokal.

Berdasarkan data wawancara dengan lima responden yang berstatus warga transmigrasi lokal dan bekerja sebagai petani untuk didapatkan rata-rata pendapatan minimal mereka adalah sebagai berikut:

Responden 1 Bapak Niman (42 thn) menyatakan bahwa:

“saya sebulan kurang lebih hasil dari lahan itu satu juta rupiah dan terkadang juga jadi buruh serabutan di bangunan bisa cukup lumayan lagi untuk tambahan.”

Responden II Bapak Adi Sumarto (60 thn) menyatakan bahwa:

“untuk penghasilan saya sebulan kurang lebih lima ratus ribu rupiah karena lahan saya sempit jadi penghasilannya tidak begitu maksimal, untuk memenuhi kebutuhan yang lain istri membuka warung jajanan untuk membantu keadaan ekonomi keluarga dan saya terkadang juga mencari tambahan dengan menjadi buruh pembuatan batu bata untuk menambah penghasilan”

Responden III Bapak Daljiman (56 thn) menyatakan bahwa:

“saya hasil dari lahan kalau harga cabai lagi bagus bisa mencapai delapan ratus ribu rupiah untuk panennya, bahkan satu juta rupiah. Penghasilan tergantung hasil panen dengan harga dipasaran.”

Responden IV Bapak Rochmad Romdhoni (32 thn) menyatakan bahwa:

“saya hanya jadi penggarap lahan milik orang karena lahan milik sendiri ditanam untuk dinikmati sendiri hasilnya karena tidak luas, kalau ditanya penghasilan kurang lebih tujuh ratus ribu rupiah.”

Responden V Bapak Untung Suwarman (52 thn) menyatakan bahwa:

“penghasilan sebulan saya kurang lebih diatas tujuh ratus ribu rupiah untuk hasil dari lahan. Terkadang mencari tambahan jadi buruh tambak kalau musim panen udang.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai rata-rata pendapatan minimal masyarakat transmigrasi lokal yang menjadi petani adalah Rp. 500.000,- hingga mencapai Rp. 1.500.000,- per bulan. Pendapatan sebesar itu biasanya belum

ditambah dengan ada yang menjadi buruh serabutan dan pekerjaan tambahan lainnya yang biasanya dilakukan oleh masyarakat transmigrasi lokal. pekerjaan tambahan yang dilakukan masyarakat biasanya adalah menjadi buruh bangunan, buruh tambak udang, dan usaha sendiri dengan membuka warung.

Analisis keadaan perumahan perlu dilakukan karena perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia lainnya selain makanan dan pakaian, sehingga dari kondisi rumah yang dimiliki oleh penduduk di suatu daerah dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Kondisi rumah yang dianalisis mengambil lima sampel masyarakat transmigrasi yang tinggal dan berstatus sebagai masyarakat transmigrasi lokal tahun 2014. Berikut ini adalah tabel kondisi rumah kawasan transmigrasi lokal :

Tabel 8. Kondisi Rumah Masyarakat Transmigrasi Lokal Tahun 2014

No.	Responden	Dinding		Lantai		Atap	
		Tembok	Kayu	Keramik	Semen	Genteng	Asbes
1.	Rumah I	✓		✓		✓	
2.	Rumah II	✓		✓		✓	
3.	Rumah III	✓		✓		✓	
4.	Rumah IV	✓		✓		✓	
5.	Rumah V		✓		✓	✓	

Data Interview Lapangan

Tabel 8. memperlihatkan bahwa kondisi rumah masyarakat transmigrasi lokal paling banyak berdinding tembok dan berlantai keramik serta beratap genteng, walaupun ternyata masih ditemukan ada rumah warga masyarakat transmigrasi yang dapat dikatakan belum layak untuk menggambarkan

kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari aspek jumlah pendapatan minimal dan keadaan perumahan yang ada di kawasan transmigrasi lokal, maka masyarakat sudah dapat dikatakan hidup layak dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LKM BMT Trans Ngudi Makmur dari tahun 2008 hingga sekarang.

Dilihat dari aspek lingkup dan tingkatan pemberdayaan tentang pemberdayaan masyarakat yang melakukan pendekatan dengan mengutamakan masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktivitas dalam bidang ekonomi dan memiliki penghasilan lebih baik, maka bisa dikatakan kondisi masyarakat yang ada sekarang sudah mengalami peningkatan kemandirian dalam mendapatkan peluang untuk pemasaran produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

3. Evaluasi Keberdayaan Masyarakat

Indikator untuk sebuah masyarakat bisa dianggap berdaya adalah apabila mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan dalam lingkungannya sendiri berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan mampu mengelola pembangunan dalam lingkungannya secara berkelanjutan. Indikator tersebut sebenarnya lebih mengacu kepada kemampuan yang dimiliki masyarakat itu sendiri khususnya adalah sumber daya manusia daripada capaian hasil pembangunan yang didapatkan, karena dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai, maka jaminan untuk keberlanjutan pemberdayaan masyarakat lebih dapat diandalkan.

Partisipasi masyarakat transmigrasi lokal untuk turut andil dalam memberikan swadaya baik berupa finansial, material maupun tenaga yang cukup

besar maka bisa dikatakan bahwa masyarakat transmigrasi lokal telah mampu mencapai tingkatan mandiri dalam hal pembangunan di lingkungannya. Pemberian swadaya dapat dilihat dari awal pembentukan LKM BMT Trans Ngudi Makmur yang diprakarsai sendiri oleh keinginan masyarakat dengan bantuan dari pihak luar yaitu pemerintah sebagai Instansi untuk memberikan legalitas suatu kelembagaan. Dilihat dari aspek kepentingan umum yang lebih luas maka partisipasi masyarakat transmigrasi lokal lebih dimotivasi dari nilai manfaat untuk kepentingan umum yaitu masyarakat transmigrasi lokal dalam penanggulangan kemiskinan.

Evaluasi mengenai pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu evaluasi yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat selaku pelaku pembangunan dan evaluasi oleh pihak luar dalam hal ini adalah peneliti. Evaluasi oleh masyarakat sendiri lebih bersifat tindakan evaluatif praktis, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan siklus pemberdayaan dan implementasi atau pencapaian program yang telah direncanakan. Sedangkan evaluasi oleh peneliti sebagai pihak luar lebih bersifat untuk mengevaluasi proses pemberdayaan yang ada saat ini dari sudut pandang akademis berdasarkan kondisi-kondisi ideal yang diharapkan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks kemandirian yang sesungguhnya maka seharusnya masyarakat mampu untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan dan mampu mengelola potensi yang dimiliki sehingga kondisinya lebih baik dari yang ada sebelumnya. Selama ini penyusunan program kegiatan dan pelaksanaan program cenderung menyesuaikan ketersediaan dana dan

dukungan yang ada khususnya dari LKM BMT Trans Ngudi Makmur, sedangkan idealnya program dan kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat disertai strategi dan usaha untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat itu sendiri. Peran LKM BMT Trans Ngudi Makmur seharusnya tidaklah banyak karena yang mengetahui kebutuhan riil itu adalah masyarakat sendiri yang ada didalamnya.

Sebagaimana disebutkan oleh Wilson (dalam Sumaryadi, 2005) tentang empat tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap awal berupa penyadaran (*awakening*), tahap kedua sudah mengarah kepada pemahaman (*understanding*), tahap ketiga sudah menuju pada ranah pemanfaatan (*harnessing*), dan tahap terakhir yaitu menjadikan proses-proses dalam pemberdayaan masyarakat sebagai suatu kebiasaan (*using*), maka perkembangan proses pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal sudah menuju pada tahap ketiga yaitu pemanfaatan. Setelah masyarakat menyadari dan mengerti tentang pemberdayaan maka mereka memutuskan untuk menggunakannya sebagai kepentingannya bersama masyarakat transmigrasi lokal.

Untuk dapat dikatakan mencapai tahapan pembiasaan, masyarakat masih membutuhkan lebih banyak pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dalam hal sumber daya manusia sehingga dapat dinyatakan siap untuk secara penuh bertanggungjawab dalam pengelolaan pembangunan di tingkat kawasan transmigrasi lokal. Selama ini tingkat ketergantungan masyarakat transmigrasi lokal untuk minta diarahkan oleh penyuluh atau fasilitator pendamping masih tinggi, dimana ketika peran fasilitator berkurang

maka aktivitas dalam masyarakat transmigrasi lokal pun belum benar-benar dapat berjalan secara mandiri.

Ditinjau dari sisi individu, maka sebuah kawasan transmigrasi lokal dapat dikatakan berdaya apabila masing-masing individu masyarakat telah memahami konsep pemberdayaan yang ada sehingga dapat tergerak untuk berperan secara aktif di dalamnya dan lama kelamaan hal tersebut menjadi sebuah budaya dan mendarah daging dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Individu-individu masyarakat di kawasan transmigrasi lokal yang selama ini aktif terlibat atau peduli terhadap program pemberdayaan masyarakat masih didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perangkat desa dan tokoh perempuan, sedangkan keterlibatan individu lain seperti warga yang benar-benar dapat dikatakan tergolong warga miskin dan yang masih rentang lainnya masih kurang bahkan bisa dikatakan sedikit sekali yang terlibat.

Pelaksanaan pengembangan kemampuan masing-masing individu juga harus tetap memperhatikan atau menyesuaikan karakteristik masing-masing individu pada khususnya dan karakteristik masyarakat transmigrasi lokal pada umumnya, sehingga semua elemen di dalam kawasan masyarakat transmigrasi lokal dapat terlibat secara penuh dalam proses pembangunan menuju kesejahteraan